

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Gedongtengen**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 50 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

Oleh karena itu kecamatan merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kecamatan dibantu oleh Kelurahan yang berkedudukan sebagai perangkat Kecamatan.

Pembentukan organisasi Kecamatan di Wilayah Kota Yogyakarta tidak terlepas dari adanya dinamika atau perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Namun dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, kecamatan menjadi salah satu perangkat daerah yang diatur melalui Perda Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tersebut dan juga Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor: 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta, Pasal 3 (tiga) , kecamatan berkedudukan :

1. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
2. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya pada Pasal 4 (empat) di sebutkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan di wilayah masing-masing. Sedangkan fungsi kecamatan tertera pada Pasal 5 (lima) sebagai berikut:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (empat) di atas, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat

- c. pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; dan
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- g. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;
- h. pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Gedongtengen sebagai kecamatan tipe A mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut:



## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Gedongtengen

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia / Kepegawaian

PNS	:	29 orang
Naban/PTT	:	4 orang

Untuk data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

	<b>Uraian</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Gol II</b>	<b>Gol III</b>	<b>Gol IV</b>	<b>Jumlah</b>
1	Camat	1	-	-	-	1	1
2	Sekcam	-	1	-	-	1	1
3	Kasi Kecamatan	1	2	-	3	-	3
4	Kasubag	1	1	-	2	-	2
5	JFU kecamatan	3	2	1	4	-	5
6	JFT kecamatan	1	1	2	-	-	2
7	Naban kecamatan	4	-	-	-	-	4
8	Lurah	1	1	-	2	-	2
9	Sekretaris kelurahan	1	1	-	1	-	2
10	Kasi kelurahan	3	3	-	6	-	6
	<b>Jumlah</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>22</b>	<b>2</b>	<b>29</b>

Data Diklat Struktural / penjenjangan bagi pejabat struktural :

<b>No</b>	<b>Jenis Diklat</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	
			<b>Laki – Laki</b>	<b>Perempuan</b>
1	Diklatpim III	2	1	1
2	Diklatpim IV	2	1	1
3	ADUM	17	9	8
4	SEPADA	-	-	-
5	Struktural yang belum diklat penjenjangan	1	-	-

Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan:

<b>No</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	
			<b>Laki – Laki</b>	<b>Perempuan</b>
1	S2	2	1	1
2	S1	7	2	5
3	D III	7	3	4
4	SLTA	13	7	6
5	SLTP	1	1	-
6	SD	1	1	-
	<b>Jumlah</b>	<b>29</b>	<b>14</b>	<b>15</b>

Jumlah Pegawai Kecamatan Gedongtengen berdasarkan Eselonering adalah sebagai berikut:

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki – Laki	Perempuan
1	III A	1	1	-
2	III B	1	-	1
3	IV A	5	2	3
4	IV B	9	5	4

#### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gedongtengen adalah sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Gedung Kantor Kecamatan	1	Baik
2	Pendopo Kecamatan	1	Baik
3	Rumah Dinas Camat	1	Baik
4	Gedung Kantor Kelurahan	2	Baik
5	Kendaraan Dinas Roda 4	1	Baik
6	Kendaraan Dinas Roda 3	1	Baik
7	Kendaraan Dinas Roda 2	11	Baik
8	Sound System	1	Baik
9	Wireless / Sound System	1	Baik
10	Telepon	3	Baik
12.	Telepon 3 digit	3	Baik
13.	Ipone (ruangan)	7	Baik
14.	Laptop	3	Baik
15.	Komputer	14	Baik
16.	Notebook	-	-
17.	Komputer Tablet	1	Baik
18.	PC Kiosk	1	Rusak
19.	Ruang Rapat	3	Baik
20.	AC	7	1 rusak
21.	Almari	21	Baik
22.	Kursi	100	Baik
23.	Meja	25	Baik
24.	Meja Komputer	9	Baik

25.	Printer	12	Baik
26.	Sepeda	1	Rusak
27.	Sepeda listrik	1	Rusak
28.	Kamera	2	Baik
29.	Radio	4	Baik
30.	Televisi	2	Baik
31.	APAR	36	Baik

## 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Gedongtengen

### 2.3. a. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gedongtengen

Tabel 2.1  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gedongtengen  
Kota Yogyakarta

NO	Indikator Kinerja Sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian					Rasio				
					Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat		79,50		77,50	77,75	78	78,25	78,50	78,21	79,37	79,37	80,03	81,10	100 %	100%	100%	100%	100%
2.	Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan dengan baik		10		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Swadaya Masyarakat		24%		24%	25%	25%	25,53%	29,73%	24,33%	25,50%	26,33%	28,12%	30,55%	101%	102%	105%	106%	106,11%

### 2.3.b. Kinerja Keuangan Kecamatan Gedongtengen

Tabel 2.2.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Gedongtengen

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	320.223.875	411.252.183	548.529.556	527.948.908	625.432.993	287.941.134	369.398.513	468.628.621	449.542.230	585.390.748	90	90	85	85	94	14,33	15,25
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	60.083.000	126.309.450	107.123.750	148.296.000	126.107.500	53.449.185	106.061.225	81.916.542	111.877.478	102.019.161	89	84	76	75	81	15,98	13,80
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-	16.134.950	-	-	-	-	14.237.500	-	-	-	-	88	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4.632.000	6.090.000	18.777.500	44.720.000	19.010.500	4.632.000	6.080.000	11.505.500	42.747.000	15.821.530	100	100	61	96	83	32,63	27,85
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Gedongtengen	20.716.000	114.945.964	118.099.700	312.243.524	353.396.607	19.678.500	112.261.964	97.173.300	283.783.464	342.013.798	95	98	82	90	97	76,36	77,02
Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	20.716.000	114.945.964	41.449.500	156.276.250	89.828.000	19.678.500	112.261.964	37.758.425	151.477.590	87.381.760	95	98	91	97	97	16,73	18,27

Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	-	-	42.046.200	86.729.974	136.553.857	-	-	37.476.875	85.813.474	134.916.038	-	-	89	99	99	26,57	29,20
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	-	-	34.604.000	69.237.300	127.014.750	-	-	21.938.000	46.492.400	119.716.000	-	-	63	64	94	29,70	40,41
Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen	14.000.000	537.323.800	452.252.750	589.539.000	918.285.000	13.790.000	468.348.750	417.983.810	562.342.350	868.489.380	99	87	92	94	95	130,87	129,0
Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen	14.000.000	403.321.750	153.169.000	222.475.000	232.785.000	13.790.000	357.215.750	136.518.000	206.613.450	224.058.000	99	89	89	89	96	75,45	74,65
Pembangunan Wilayah Kecamatan Gedongtengen	-	-	166.183.500	202.738.000	303.780.000	-	-	157.564.000	199.242.900	269.205.380	-	-	95	98	89	12,82	11,31
Pemberdayaan Masyarakat Kel. Sosromenduran	-	63.120.050	60.939.250	74.739.000	184.961.500	-	56.120.000	53.081.300	72.144.000	182.982.500	-	89	87	97	99	24,86	28,08
Pemberdayaan Masyarakat Kel. Pringgokusuman	-	70.882.000	71.961.000	89.587.000	196.758.500	-	55.013.000	70.820.510	84.342.000	192.243.500	-	78	98	94	98	22,28	22,11



## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Gedongtengen**

Dalam proses pencapaian tujuan terdapat tantangan dan peluang terhadap pengembangan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Gedongtengen. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **2.4.1. Tantangan**

Tidak mudah menyarikan tantangan yang ada terhadap birokrasi terutama pada jajaran Perangkat Daerah Kecamatan, namun beberapa hal dapat dijadikan pertimbangan sebagai tantangan, yaitu:

1. Kemajuan globalisasi seperti saat ini birokrasi dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat dan mudah kepada masyarakat
2. Era keterbukaan informasi publik menuntut pelayanan informasi secara cepat dan mudah
3. Implementasi kebijakan publik desentralisasi harus menekankan prinsip-prinsip good governance pada fungsi-fungsi regulasi, pelayanan publik dan pembangunan kesejahteraan masyarakat
4. Masa reformasi birokrasi dan perubahan yang semakin dinamis, menuntut para birokrat lebih adaptif, kompetitif (memiliki kompetensi) dan memahami regulasi yang ada.
5. Kebutuhan masyarakat yang semakin beragam akan berpengaruh pula dalam upaya fasilitasi pemberdayaan masyarakat

### **2.4.2. Peluang**

Selain tantangan sebagaimana telah diuraikan, terdapat peluang yang memberikan kesempatan kepada pemerintah / birokrasi pada tingkatan Perangkat Daerah Kecamatan untuk mengembangkan diri dalam melayani masyarakat, yaitu:

1. Birokrasi tetap diperlukan oleh masyarakat sesuai dengan fungsinya sebagai regulator terhadap pelayanan kepada masyarakat, oleh karenanya harus dapat memerankan fungsi tersebut dengan lebih baik.
2. Masyarakat sangat memerlukan pelayanan yang baik dari birokrat sehingga memungkinkan untuk mengadakan reformasi dalam pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat serta adanya perubahan mindset bahwa birokrasi berfungsi untuk melayani.
3. Dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana pemerintah memiliki kekuatan aset yang cukup untuk mengembangkan profesionalisme dan

kompetensi birokrasi. Dengan demikian maka optimalisasi sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat sangat diperlukan.

4. Dalam pemberdayaan masyarakat pemerintah merupakan fasilitator sehingga dapat memerankan diri dalam program dan kegiatan pada tataran langsung kepada masyarakat.
5. Tuntutan masyarakat terhadap penerapan prosedur kerja yang baik serta standar yang jelas memberikan kesempatan bagi birokrasi untuk menata dan berbenah diri secepat mungkin, termasuk diantaranya adalah optimalisasi dan pembaharuan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kepada masyarakat.